

KLIPING

KORAN DIGITAL
Batam Pos

PERTAMA, TERBESAR, TERPERCAYA

JUMAT, 16 JULI 2021



ROMBONGAN Perpat bersama anggota DPRD dan LAM Kabupaten Bintan geruduk posko penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Sei Pulau, Kamis (15/7).

Geruduk Posko Penyekatan Sei Pulau

Minta RT-Antigen Berbayar Dihapuskan

Reporter : PERI IRAWAN
Editor : GUSTIA BENNY

TANJUNGPINANG (BP) - Rombongan Persatuan Pem-

uda Tempatan (Perpat) bersama anggota DPRD dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan geruduk posko penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Kilometer (Km), Sei Pulau. Mereka mempertanyakan dasar diterapkannya rapid test antigen berbayar oleh pihak kimia farma.

Ketua Perpat Bintan, Hasriawadi menjelaskan petugas medis yang bertugas di posko penyekatan tidak memiliki

surat tugas, sehingga dinilai janggal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Yang lebih membuatnya bearing saat ada kwitansi pembayaran oleh salah satu warga Bintan yang hendak ke Tanjungpinang.

"Ini sangat tidak manusiawi, setelah puluhan tahun warga Bintan ke Tanjungpinang menjual hasil kebun, namun sekarang harus menangis di depan pintu DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka ka-

rena terhalang di perbatasan," kata Hasriawadi, Kamis (15/7).

Hasriawadi yang juga anggota DPRD Bintan menyebutkan di Bintan juga menerapkan PPKM namun tidak ada keributan, sangat kondusif. Pihaknya tidak bermaksud mengintervensi wali kota Tanjungpinang, namun dalam penerapan kebijakan harus bisa memiliki rasa kemanusiaan.

"Jika kita merujuk pada aturan gubernur tidak ada satu daerah di Kepri yang memun-

gut biaya Rp 150 ribu dari rapid tes antigen, jika ada tolong tunjukkan kepada saya," tegasnya.

Legislator itu menyebutkan bagaimana warga Bintan yang berpenghasilan Rp 120 ribu dalam satu hari sementara harus membayar Rp 150 ribu biaya rapid test antigen, sedangkan warga Tanjungpinang yang bekerja di Bintan disambut baik.

Ia meminta kepada wali kota Tanjungpinang untuk

mengevaluasi kebijakan itu. "Perlu Bu Rahma ketahui, 75 persen ASN Bintan adalah warga Tanjungpinang, tapi kami welcome kepada mereka walaupun hati kami sakit ingin menyetop karena Tanjungpinang ditetapkan PPKM darurat seharusnya kami yang waspada," sebutnya.

Sementara itu Ketua LAM Kabupaten Bintan, Mustafa Abas meminta kepada wali kota Tanjungpinang untuk membahas bersama kembali,

jangan sampai menjadi masalah besar.

"Masalah pandemi aja belum dapat diatasi, dengan gejala warga harus bayar Rp 150 ribu ini jadi masalah besar, dan tidak mudah bagi masyarakat disaat krisis keuangan seperti sekarang," ucapnya.

Kebijakan itu dinilai sangat menyengsarakan masyarakat, tidak hanya untuk warga umum bagi kalangan pengusaha juga merasa keberatan jika harus bayar antigen. (***)

Salat Iduladha Ditiadakan

Di Lapangan maupun Masjid

Reporter : PERI IRAWAN
Editor : GUSTIA BENNY

TANJUNGPINANG (BP) - Pemko Tanjungpinang menetapkan pelaksanaan salat Iduladha yang jatuh pada Selasa 20 Juli 2021 mendatang dilaksanakan di rumah masing-masing.

Salat Iduladha secara berjamaah di masjid dan di lapangan terbuka tidak diizinkan mengingat kasus Covid-19 masih tinggi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Tanjungpinang masih diberlakukan.

Koordinator Lapangan Protokol Kesehatan (Protkes) Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan hasil rapat semua elemen masyarakat dan edaran Gubernur Kepri, pada masa kondisi darurat sudah disepakati pelaksanaan salat Iduladha hanya boleh dilaksanakan di rumah masing-masing. "Dengan keluarga inti saja," kata Surjadi, Kamis (15/7).

Tidak hanya itu, lanjut Surjadi untuk pemotongan hewan kurban akan diatur oleh pe-

tugas kesehatan, akan dibatasi orang yang ada di lokasi kurban, yang diperbolehkan hanya petugas pemotongan sedangkan daging kurban akan diantar oleh panitia ke rumah warga.

"Diharapkan tidak terjadi penumpukan saat pemotongan hewan kurban," sebutnya.

Saat rapat, kata Surjadi juga mengundang dewan kemakmuran masjid yang ada di Tanjungpinang sekaligus bentuk sosialisasi yang nantinya disampaikan kepada para pengurus masjid.

"Para pengurus masjid tentunya sudah tahu, dipastikan tidak ada lagi warga yang melaksanakan salat Iduladha di masjid ataupun lapangan terbuka," tuturnya.

Surjadi menyebutkan akan ada patroli ke masjid atau lapangan terbuka memantau masyarakat yang bandel melaksanakan salat Iduladha berjamaah.

"Kita akan patroli juga, tidak perlu ada saksi tapi diusahakan bisa patuh karena ada sosialisasi sebelumnya," tambahnya. (*)



F.PERI IRAWAN / BATAM POS

KOORDINATOR Lapangan Protkes Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Surjadi memberikan penjelasan terkait penanganan Covid.